

**STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM UPAYA PENANGANAN PENYEBARAN RADIKALISME
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Ida Bagus Dhiyo Pramana

NPP. 30.1254

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: dhiyopramanaidabagus@mail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H Ondo Riyani, M.Si

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): In the era of globalization, information is so easy to enter and develop in a region, including radicalism. Radicalism is a threat to a region because it can be a seed that destroys the peace of a region. This research is entitled STRATEGY OF THE NATIONAL AND POLITICAL UNITY BODY IN AN EFFORT TO HANDLE THE SPREAD OF

RADICALISM IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE, Purpose: to know the strategy of the national and political unity agency in an effort to handle the spread of radicalism in the province of Central Sulawesi and to find out efforts to overcome the problems that occur. **Method:** the method used is a qualitative method, which is to answer a problem in depth in the context of the time and situation concerned, in accordance with the objective conditions in the field and the type of research used is descriptive qualitative, which describes the object at the present time qualitatively the data obtained from the research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques use observation, interview, and documentation methods. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Results/findings: shows that many of the strategies of the National and Political Unity Agency of Central Sulawesi Province are targeted at the community and with long-term goals and also for the short term the National and Political Unity Agency conducts surveillance to prevent conflict.

Conclusion: in an effort to deal with the spread of radicalism, the National and Political Unity Agency has fulfilled the points in the concept of strategy formulation so that the strategy carried out has been right on target and in accordance with the mission of the National and Political Unity Agency and also the mission of the Governor of Central Sulawesi.

Keywords: national and political unity body, strategy, radicalism

ABSTRAK

Permasalahan/latar belakang (GAP) : Di era globalisasi informasi begitu mudah untuk masuk dan berkembang dalam suatu wilayah, termasuk paham radikalisme. Paham radikalisme merupakan sebuah ancaman bagi suatu wilayah karena bisa menjadi bibit yang merusak ketentraman suatu wilayah. Penelitian ini berjudul STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM UPAYA PENANGANAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI SULAWESI TENGAH, **Tujuan :** untuk mengetahui strategi badan kesatuan bangsa dan politik

dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme di provinsi Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. **Metode** : metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi objektif di lapangan dan adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/temuan** : menunjukkan bahwa strategi badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sulawesi Tengah banyak yang menasar pada masyarakat dan dengan tujuan jangka panjang dan juga untuk jangka pendeknya badan kesatuan bangsa dan politik melakukan pengawasan guna mencegah konflik. **Kesimpulan** : dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme, badan kesatuan bangsa dan politik telah memenuhi poin poin dalam konsep formulasi strategi sehingga strategi yang dilakukan telah tepat sasaran dan sesuai dengan misi badan kesatuan bangsa dan politik dan juga misi dari Gubernur Sulawesi Tengah.

Kata kunci: badan kesatuan bangsa dan politik, strategi, radikalisme

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sejarah perjuangan yang cukup panjang dalam mencapai kemerdekaan mulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Mempertahankan sebuah kemerdekaan tidaklah mudah, banyak ancaman datang yang bisa bersumber baik dari dalam ataupun luar negeri dan baik secara fisik ataupun nonfisik. Semakin berkembangnya zaman bentuk ancaman yang muncul kian beragam dan jika tidak mengambil langkah yang tepat bukan tidak mungkin Indonesia yang sedang berkembang akan mengalami kemunduran atau bahkan kehancuran. Pada era globalisasi dimana interaksi dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah dilakukan membuat masyarakat banyak menerima informasi yang bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif. Hal positif seperti jika masyarakat memanfaatkan kemudahan informasi ini untuk mempelajari sesuatu yang baru dari belahan dunia. Hal negatif yang terjadi seperti penyebaran paham radikalisme yang bisa menjadi ancaman bagi bangsa. Sesuatu seperti radikalisme tersebut harusnya tidak menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia karena Indonesia sudah memiliki ideologi Pancasila yang sesuai dengan kehidupan sehari – hari masyarakat, terdapat aturan aturan yang bisa mencegah radikalisme tersebut masuk dan menyebar.

Mengacu data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait penyebaran paham radikal di Indonesia terdapat beberapa wilayah dengan indeks resiko terorisme yang cenderung tinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Dikatakan indeks resiko terorisme yang cenderung tinggi karena wilayah tersebut menyumbang pelaku terror yang cukup banyak sehingga pada wilayah tersebut dilakukan pengawasan yang ketat. Berangkat dari kelima wilayah tersebut daerah yang masih cukup sering terjadi aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah dimana terdapat kelompok radikal bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berlokasi di Kabupaten Poso. Berikut beberapa aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini sewaktu Ali Kalora memimpin kelompok MIT. Sejalan dengan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, demokratis, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah harus mengambil tindakan untuk menghentikan perluasan radikalisme di provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan tempat organisasi radikal tersebut berbasis, karena

kelompok MIT di Poso jelas bertentangan dengan tujuan ini. Agar Pancasila sebagai ideologi semakin kuat dan berkembang tanpa digerogoti oleh radikalisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah harus memiliki rencana yang tepat untuk menghentikan pertumbuhan radikalisme.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan data jumlah tersangka terorisme di Indonesia Tahun 2017 – 2021 dari POLRI dilihat bahwa pada tahun 2017 angka tersangka terorisme tidak sampai dua ratusan orang dan kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2018 terjadi peningkatan yang cukup besar menjadi empat ratusan orang, dari tahun 2019 sampai 2020 mulai terjadi penurunan namun pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa paham radikal telah ada dan bertahan di masyarakat terlihat dari jumlah tersangka terorisme yang selalu lebih dari seratus orang tiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait penyebaran paham radikal di Indonesia terdapat beberapa wilayah dengan indeks resiko terorisme yang cenderung tinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Dikatakan indeks resiko terorisme yang cenderung tinggi karena wilayah tersebut menyumbang pelaku terror yang cukup banyak sehingga pada wilayah tersebut dilakukan pengawasan yang ketat. Berangkat dari kelima wilayah tersebut daerah yang masih cukup sering terjadi aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah dimana terdapat kelompok radikal bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berlokasi di Kabupaten Poso Hal ini menunjukkan bagaimana radikalisme telah menyebar di masyarakat, dan merupakan tugas negara untuk mencegah tumbuhnya radikalisme yang bertentangan dengan pandangan hidup Pancasila.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Subagyo berjudul Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme (Subagyo, 2020), menunjukkan bahwa arus globalisasi telah memberikan kemudahan bagi masuknya berbagai ajaran, paham maupun ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. oleh karena itu, ideologi pancasila harus diselamatkan dari bentuk ancaman seperti Intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Penelitian Aiminah berjudul Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Aminah, 2016), menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memerangi radikalisasi dan terorisme melalui tindakan terorisme melalui upaya penguatan kebijakan, penguatan lembaga pendidikan formal, penataan penggunaan media, perubahan pola deradikalisasi, peningkatan ekonomi masyarakat, dan strategi pencegahan deteksi dini. Selain itu, pemerintah juga harus kreatif dalam memerangi radikalisasi dan terorisme dengan memperbaharui kurikulum dengan memasukan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika (pluralisme) pada semua jenjang pendidikan. Penelitian Fahmi Rizal berjudul Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Deradikalisasi Generasi Muda (Rizal Fahmi, 2021), menunjukkan bahwa paham radikalisme pada generasi muda merupakan ancaman jangka panjang bagi negara dan upaya deradikalisasi melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya yang relevan, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang mampu mencegah perkembangan paham radikalisme. Penelitian Arini Indah Nihayaty berjudul Strategi Pembinaan Mental Masyarakat Dalam Menghadapi Radikalisme (Arini Indah Nihayaty, 2020), menunjukkan bahwa Pembinaan mental dan spiritual dalam lembaga pendidikan mutlak diperlukan agar pengadopsian dan pelaksanaan keyakinan agama tidak mengganggu persatuan di antara anggota masyarakat majemuk di Indonesia.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bentuk upaya dari badan kesatuan bangsa dan politik Sulawesi Tengah dalam penanganan penyebaran radikalisme yang telah ada. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan lokus di provinsi Sulawesi Tengah dan berfokus pada bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan radikalisme

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga mengetahui apa saja penghambat dalam strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah terkait upaya penanganan penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis data menggunakan konsep formulasi strategi menurut Wheelen-Hunger yakni menyajikan data dari yang sesuai dengan penelitian kemudian data di analisis dengan 4 dimensi, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kepala Bidang Kewaspadaan, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Masyarakat, dan Agama, Kepala Bidang Politik, Masyarakat disekitar wilayah Poso dan Parigi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Misi

- a) Meningkatkan dan mempertahankan kohesivitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, kesulitan, dan tantangan;
- c) Mengembangkan kehidupan politik yang menghormati nilai-nilai budaya, etika politik, dan keanekaragaman aspirasi masyarakat;
- d) Memperkuat sistem politik yang demokratis dalam kerangka sistem politik nasional;
- e) Meningkatkan kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat;
- f) Mengembangkan pelaksanaan fungsi, peran serta, dan efektifitas organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok lainnya

3.2 Tujuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut: "Mewujudkan Kondusifitas Daerah Melalui Pembinaan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoeksosbud)".

Dari misi yang disebutkan sebelumnya, badan kesatuan bangsa dan politik memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a) Penurunan angka radikalisme
- b) Pencegahan Konflik
- c) Ketahanan ideologi negara

3.3 Strategi

Mengimplementasikan tujuan dan sasaran organisasi ke dalam kebijakan dan program dilakukan melalui strategi. Elemen yang paling penting dalam perencanaan adalah strategi, karena strategi yang baik akan dapat mengoptimalkan kemungkinan pencapaian tujuan dan mengurangi hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut. Strategi dari badan kesatuan bangsa dan politik :

- a) Pembinaan masyarakat
- b) Pengawasan masyarakat
- c) Kerjasama intelkam

Strategi yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik banyak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi.

3.4 Kebijakan

Kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk pelaksanaan tindakan yang akan datang (program dan kegiatan). Kapasitas untuk mengubah rencana menjadi kebijakan yang tepat dan dapat diimplementasikan merupakan komponen penting dalam penyusunan kebijakan. Dalam rangka menjamin kelancaran perwujudan sasaran, tujuan, visi, dan maksud, kebijakan pada hakikatnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam perumusan atau pelaksanaan program. Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan bidang yang ada pada badan kesatuan bangsa dan politik, yaitu bidang wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan, bidang sosial budaya, dan bidang politik.

Hambatan yang dialami oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah

- 1) Faktor geografis
- 2) Bencana alam gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami pada 2018
- 3) Pandemic Covid – 19
- 4) Pendidikan masyarakat yang belum merata
- 5) Minim sarana prasarana

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2016) pemerintah memang memegang peran yang sangat penting dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme. Pemerintah memiliki segala komponen pendukung yang dapat membuat penanggulangan radikalisme dan terorisme itu bisa terlaksana dengan baik. kelompok radikal yang ada di Sulawesi Tengah telah ada cukup lama namun kelompok tersebut sudah tidak memiliki banyak anggota seperti awal kemunculannya dan juga masyarakat yang mendukung pemberantasan kelompok tersebut. Menurut penelitian subagyo (2020), penelitian rizal fahmi (2021), dan penelitian Arini indah (2020) pendidikan kewarganegaraan dan penguatan ideologi pancasila dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan

oleh pemerintah dalam memberantas radikalisme. Seperti apa yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Sulawesi Tengah, strategi yang dilakukan oleh badan kesbangpol telah tepat sasaran yaitu masyarakat sebagai objek dan strategi yang dilakukan juga tidak hanya berdampak jangka pendek namun juga akan berdampak jangka panjang nantinya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah banyak bersifat persuasif dengan pendekatan kekeluargaan melalui forum forum komunikasi dengan masyarakat. Seperti pada forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, telah sesuai dengan konsep formulasi strategi menurut Wheelen-Hunger, semua dimensi yang ada dalam konsep formulasi strategi menurut Wheelen-Hunger telah terpenuhi dalam strategi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah. Yang dimana konsep formulasi strategi ini diperlukan untuk bisa membuat sebuah strategi yang tepat, menghasilkan kebijakan yang tepat, dan sesuai dengan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah juga menemui beberapa hambatan dalam upaya melaksanakan tugasnya, hambatan ada yang dari dalam badan dan ada juga yang dari luar badan itu sendiri. Ada hambatan dari hal yang tidak terduga seperti bencana alam dan pandemi covid19. Namun, sebagian besar hambatan – hambatan yang ditemui oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah banyak berasal dari masyarakat itu sendiri. Terutama dalam pengimplementasian nilai nilai pancasila dilingkungan masyarakat yang masih kurang. Namun, dengan menggunakan konsep formulasi strategi yang disesuaikan lagi dengan situasi dan hambatan yang ada sehingga strategi yang dijalankan dapat tepat sasaran. Guna mengoptimalkan strategi berhasil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatannya disarankan mengundang tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam tiap wilayah sehingga setidaknya tiap wilayah memiliki wakil yang hadir dan menyebarkan informasi nantinya kepada masyarakat. Daripada mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat dari wilayah yang sama sehingga apa yang coba dilakukan bisa tidak dirasakan dan tidak tersampaikan dengan baik ke semua wilayah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni waktu dan biaya
Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah jajarannya dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme

Aminah, S. (2016). PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA. JURNAL KELITBANGAN.

Rizal Fahmi, A. N. (2021). penguatan pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya deradikalisasi generasi muda. jurnal pancasila dan kewarganegaraan.

Arini Indah Nihayaty, B. S. (2020). STRATEGI PEMBINAAN MENTAL MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI RADIKALISME.

Moleong, L. J. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

